



RENCANA KERJA

DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025 - PERUBAHAN





GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000.7.2/252/Bappeda-G.5T/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta adanya perubahan kebijakan nasional/daerah, kondisi dan kebutuhan pembangunan, serta penyesuaian anggaran, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 000.7.2/252/Bappeta-9.9/2025
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

1. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Perubahan Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Perubahan Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

21. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
22. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Perubahan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Perubahan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
38. Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Berkah dan RahmatNya, sehingga terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penusunan dokumen Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merancang Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai maksud sebagai pedoman untuk menjabarkan visi dan misi kegiatan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah bagi pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan pemerintah, masyarakat, usaha jasa pariwisata dan pihak-pihak lainnya. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh perangkat Daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah mengenal kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No.08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata.
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan PD adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025.

Adapun dengan terbatasnya pendanaan sehingga terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran di anggaran induk tahun 2025. Untuk itu

dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran di pos-pos belanja yang menunjang pelaksanaan operasional dinas.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan Sistematika, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH :

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 Dinas Pariwisata

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebagaimana tersebut dalam table dibawah ini :

2.	Meningkatkan Pengeloesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeeri	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat daerah	Laporan	2	15,709,600,965	2	6,043,280,574	3	8,515,933,304	3	0,484,670,704	##	1,038,136,369	1	1,935,932,498	1	1,196,063,890	###	4,170,132,757	4.25	10,213,413,331	0.75	0.49	2.13	65.01	Tiadan IV
		3.26.01.10.201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	63	12,895,111,029	59	5,741,016,116	63	8,248,293,304	63	8,244,385,704	63	1,016,456,369	63	1,851,085,738	63	1,119,255,370	###	4,016,791,471	248.00	9,157,816,593	3.00	0.49	3.94	75.67	
		3.26.01.10.202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pengadministrasi Pelaksanaan	Dokumen	12	2,687,209,312	12	135,123,000	12	136,080,000	12	136,080,000	2	21,600,000	1	32,520,000	1	32,520,000	8.00	86,720,000	20.00	221,840,000	0.67	0.54	1.67	8.26	
		3.26.01.10.205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	Laporan	1	127,230,623	1	167,444,458	1	111,620,000	1	100,225,000	-	-	0.75	52,326,760	0.10	14,279,520	0.95	66,505,280	1.85	231,743,138	0.85	0.56	1.85	183.65	
		3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Asset, KB dan Laporan Tahunan	Laporan	2	178,572,815	2	269,283,848	1	137,287,000	1	69,237,000	-	0.75	15,075,000	##	17,390,000	0.95	32,465,000	2.85	301,748,848	0.85	0.47	1.43	188.98		
		3.26.01.10.306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	178,572,815	1	269,283,848	2	137,287,000	1	69,237,000	-	0.75	15,075,000	0.10	17,390,000	0.95	32,465,000	1.85	301,748,848	0.85	0.47	0.93	188.98		
3.	Meningkatkan Profesionalisme ASN	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesi ASN Perangkat Daerah	Dokumen	2	124,955,377	2	112,796,800	63	139,115,000	63	109,776,000	-	-	10	18,036,640	##	73,441,380	###	91,478,020	12.50	204,274,820	0.17	0.83	6.25	163.48	Tiadan IV
		3.26.01.10.502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kalengkapan	Tersedianya Seragam	Paket	2	85,051,952	-	-	1	60,375,000	1	59,800,000	-	-	-	-	1	59,800,000	1	59,800,000	-	59,800,000	-	-	-	-	
		3.26.01.10.601	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem							3	72,300,000	1	46,600,000			0.75	16,036,540	0.10	13,441,380	0.95	314,780,200							

3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	Laporan	3	695,161,172	3	789,310,000	1	162,191,000	0								3.00	789,310,000			1.00	113.54	Trivulan IV		
3.26.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Tersedia Kerdataan Dinas Jabatan	Unit					1	33,062,000																	
3.26.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia Kerdataan Dinas/Operasional Lapangan	Unit																							
3.26.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedia Sarana dan Prasarana	Paket					1	25,045,000																	
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Sarana dan Prasarana Kaca	Paket	3	695,161,172	3	792,236,600	2	101,464,000									3.00	792,236,600			1.00	113.96			
3.26.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedia Sarana dan Prasarana Gedung	Unit																							
3.26.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedia Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit																							
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tingkat Layanan Administrasi Yang	Laporan	12	942,916,612	12	2,084,809,151	12	2,070,466,250	12	2,077,846,250	2	271,287,368	4	451,074,935	3	473,835,038	###	1,196,197,341	21.00	3,281,006,492	0.75	0.58	1.75	347.96	Trivulan IV
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menulis	Tersedia Jasa Surat Menulis	Laporan	12	2,332,846																					
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	12	392,883,613	12	260,341,449	4	258,620,000	4	258,620,000	0.75	50,837,425	1	65,347,380	1	60,286,432	2.75	116,473,287	4.75	437,414,686	0.83	0.68	1.23	111.33	
3.26.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan	Tersedia Jasa	Laporan	12	547,880,154	12	1,823,867,702	4	1,811,846,250	4	1,819,216,250	1	220,448,943	1	385,727,555	1	413,546,608	3	1,016,724,194	15.00	2,843,591,806	0.75	0.56	1.25	513.20	

	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik	Laporan	12	975,196,021	12	343,962,887	12	523,061,800	12	416,851,850	1	36,065,004	1	56,151,944	3	62,868,107			5	155,085,055	17.00	499,047,942	0.42	0.37	1.62	51.17	Triwulan I/19	
	328.01.10.901	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	11	634,668,101	13	245,315,887	11	257,307,700	13	224,065,850	3	36,065,004	4	49,921,944	3	61,518,107			10	147,505,055	23.00	392,820,342	0.77	0.66	1.77	73.49		
	328.01.10.902	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan	Unit	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
	328.01.10.906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terteliharaan Sarana dan Prasarana Kota	Unit	23	43,218,421	23	22,242,000	28	10,330,000	28	11,744,000	-	-	4	6,210,000	3	1,350,000			7	1,580,000	30.00	21,822,000	0.25	0.55	1.30	69.00		
	328.01.10.910	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terteliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	1	397,419,493	1	76,405,000	1	256,424,100	1	190,846,000	-	-	-	-	-	1.00			-	1.00	76,405,000	-	-	1.00	19.23			
4. Meningkatkan Kontribusi Pengedaaan	3.26.02	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4	2,902,660,000	4	3,783,472,852	4	1,725,887,100	4	1,205,490,300	-	-	0.25	134,380,852	1.75	86,419,000			1	220,799,852	5.00	4,004,212,744	0.25	0.18	1.25	137.95	Triwulan I/19	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Presentase Daya Tarik Wisata	%	3	800,000,000	1	295,338,750	100	243,735,600	100	76,301,000	-	-	-	-	25	36,920,000			25	36,920,000	26.00	392,318,750	0.25	0.48	8.67	41.54	Triwulan I/19	
	328.02.10.101	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan	Lokasi			1																							
	328.02.10.102	Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perencanaan	Dokumen			1																							
	328.02.10.103	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan	Lokasi	1	480,000,000	1																							

Page 3

3.26 02.10 03	Pengelolaan Destinasi Parwisata Provinsi	Presentase Destinasi Parwisata Provinsi yang terstandar	%	1	1200,000,000	1	2,249,102,842	100	706,686,499	100	367,053,000	25.00	0.25	131,780,852	#	49,499,000	###	181,279,852	26.35	2,430,382,654	0.25	0.47	###	202.53	Trwulan/17
3.26 02.10 3.01	Penetapan Destinasi Parwisata	Jumlah Destinasi Parwisata	Lokasi																						
3.26 02.10 3.02	Perencanaan Destinasi Parwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi	Dokumen	2	200,000,000	1																			
3.26 02.10 3.03	Pengembangan Destinasi Parwisata	Jumlah Destinasi Parwisata	lokasi	1	350,000,000	1																			
3.26 02.10 3.04	Pengadaan/Pe meliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelclaan Destinasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Parwisata Provinsi yang	Paket	1	200,000,000	1	1207,474,942	1	163,989,999	1	137,000,000							1.00	1207,474,942			1.00	608.74		
3.26 02.10 3.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelclaan Destinasi Parwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi	Dokumen	1	50,000,000	1																			
3.26 02.10 3.010	Peningkatan Kapastias SDM Pengelcla Destinasi Parwisata Provinsi	Tertaksanang a peningkatkan Kapastias SDM dalam pengelcla Daja Tank	Orang				86,084,376	100	367,841,500	70	106,475,000		30	67,494,272	40	48,499,000		70.00	11,582,272	70.00	202,076,644	1.00	0.85		
3.26 02.10 3.011	Penguatan Jejaing Tata Kelcla Destinasi Parwisata Tingkat Provinsi	Tertaksanang a Tata Kelcla Destinasi Parwisata Tingkat	Orang				945,543,624	30	181,845,000	70	113,173,000		30	84,287,580	#	1000,000		30.25	65,287,580	30.25	1,010,831,104	0.43	0.59		
3.26 02.10 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Parwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Meningkatnya SDMPelaku Usaha Parwisata Tentang TDUP	Orang		202,660,000	30																			

Page 4

Adapun capaian indikator Dinas Pariwisata tahun 2024 terhadap Rasio PDRB Pariwisata sebesar 0,3185 dengan target 0,46 dan capaian Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Rp. 111.400.000.000,- dengan target Rp. 150.000.000.000,- dan Jumlah Kunjungan Nusantara 9.216.968 orang dengan target 5.500.000 orang.

Berikut pencapaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan indikator presentase 25.25%.
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan indikator presentase 50.27%.
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dengan indikator presentase 22,57%.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator presentase 6,64%.

Secara keseluruhan untuk rata-rata capaian kinerja sudah baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Renja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Capaian Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi Renja		Pengampu	Catatan Analisis
				Tahun					Tahun			
				2026	2027	2028	2029	2030	2025	Thn n		
				(thn n)	(thn+1)	(thn+2)	(thn+3)	(thn+4)	Thn n			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32	0,34	0,37	0,40	0,42	0,45	0,48	0,34	Bidang Destinasi		
2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	23,973	25,000	2,875	33,000	38,000	43,700	50,300	25,000	Bidang Pemasaran Pariwisata		
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB (%)	-	3,76	3,845	3,93	4,015	4,01	4,185	3,76	Bidang Ekraf		
4	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Hari)	3,75	3 - 5	3 - 5	3 - 5	5 - 7	5 - 7	5 - 7	3 - 5	Bidang Pemasaran Pariwisata		
5	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Per kunjungan/orang (US \$)	-	500	600	700	800	900	1000	500	Bidang Pemasaran Pariwisata		
6	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Juta Orang)	9,216,969	9,000,000	9,925,000	10,850,000	11,775,000	12,700,000	13,625,000	9,000,000	Bidang Pemasaran Pariwisata		
7	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Pariwisata (Orang)	-	8,418	9,259	10,184	10,285	10,387	10,490	8,418	Bidang SDM		
8	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata Yang Tersertifikasi (Orang)	145	100	200	300	400	500	600	100	Bidang SDM		
9	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	111,400,000,000	125,000,000,000	139,781,000,000	154,954,000,000	170,127,000,000	185,300,000,000	200,473,000,000	125,000,000,000	Bidang Ekraf		
10	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Ekonomi Kreatif	-	2,338	2,571	2,828	3,110	3,421	3,763	2,338	Bidang SDM		
11	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi (Orang)	-	100	200	300	400	500	600	100	Bidang SDM		

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan sebanyak **5 (Lima) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan** dengan anggaran yang tertuang tahun 2024 sejumlah **Rp.21.403.749.267**, dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran **Rp.19.416.163.402,-** atau sebesar **90,71%**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah dilaksanakan dengan Kegiatan :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator : Nilai SAKIP Dinas Pariwisata
 - Biaya : Rp. 656.461.267,-
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Indikator : TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah
 - Biaya : Rp. 6.043.280.574,-
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Biaya : Rp. 269.283.848,-
 - 1.4. Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Indikator : Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah
 - Biaya : Rp. 112.769.800,-
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Indikator : Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah
 - Biaya : Rp. 297.598.015,-
 - 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Indikator : Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah
 - Biaya : Rp. 789.310.000,-
 - 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Indikator : Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah
 - Biaya : Rp. 2.084.809.151,-
 - 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - Indikator : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- Biaya : Rp. 343.962.882,-

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dilaksanakan dengan kegiatan :

2.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

- Indikator : Presentase Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terstrandar Pengelolaannya
- Biaya : Rp. 295.398.750,-

2.2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- Indikator : Presentase Daya Tarik Wisata Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi Yang Terstandar Pengelolaannya
- Biaya : Rp. 1.238.971.300,-

2.3 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

- Indikator : Presentase Destinasi Pariwisata Prioritas Yang Terstandar Pengelolaannya
- Biaya : Rp. 2.249.102.842,-

3. Program Pemasaran Pariwisata, dilaksanakan dengan kegiatan :

3.1 Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- Indikator : Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusanatara
- Biaya : Rp. 2.341.797.994,-

4. Progra Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dilaksanakan dengan kegiatan :

4.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana

- Indikator : Presentase Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki Sarana dan Prasana
- Biaya : Rp. 1.134.491.844,-

4.2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Indikator : Presentase Pelaku Ekraf Yang Mandiri
- Biaya : Rp. 307.391.879,-

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kretaif, dilaksanakan dengan kegiatan :

5.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tindak Lanjut

- Indikator : Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Lanjutan Yang Diberikan Pelatihan
- Biaya : Rp. 638.473.187,-

5.2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Indikator : Presentase Pelaku Ekraf Yang Mandiri
- Biaya : Rp. 254.327.614,-

2.3. Isu-isu Penting Strategis Perangkat daerah

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada dan telaahan visi dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek impikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan Pariwisata Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal.
2. Pengembangan dan peningkatan daya Tarik wisata untuk pembentukan kawasan strategis provinsi.
3. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah.
4. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
5. Perlunya koordinasi terpadu lintas sektoral untuk Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan rencana aksi dan tindak lanjut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.
6. Pengembangan Daya Saing Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

7. Pentingnya mendorong para pelaku Ekraf untuk dapat memanfaatkan layanan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
8. Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sector pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
9. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital.
10. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku pariwisata di sektor swasta.
11. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan antar bidang maupun lintas sektoral.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD

Riview terhadap Perubahan RKPD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat di lihat pada table di bawah ini :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RPKD 2025	APBD 2025	RPKD PERUBAHAN 2025	13				14					15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	3 Dokumen	0,00	72.300.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				0,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				0,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				0,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					63 Orang	63 Orang	6.440.000,00	6.440.000,00	3.376.000,00	-3.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				11.376.000,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	403.914.254,00	356.827.023,00	182.982.708,00	-220.931.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah			588.282.257,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2 Paket	2 Paket	5.000.140,00	5.000.140,00	8.263.500,00	3.263.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAN BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				9.983.012,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	69.558.860,00	70.567.928,00	40.599.794,00	-28.959.066,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				105.980.400,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					4 Paket	4 Paket	27.029.273,00	31.232.974,00	17.742.424,00	-9.286.849,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				43.917.432,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	4 Laporan	302.325.981,00	250.025.981,00	116.376.990,00	-185.948.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				428.401.413,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.750.000,00	162.191.000,00	0,00	-12.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah			252.000.000,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	0,00	33.862.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				0,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				0,00	DINAS PARHISWATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAU OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAU OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KNERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	26.845.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			0,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.01.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.750.000,00	101.484.000,00	0,00	-12.750.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			252.000.000,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.984.129.068,00	2.070.466.250,00	2.077.846.250,00	93.717.182,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah		3.333.953.392,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.01.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	254.060.000,00	258.620.000,00	258.620.000,00	4.560.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			431.162.921,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.01.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.730.069.068,00	1.811.846.250,00	1.819.226.250,00	89.157.182,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			2.902.790.471,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	262.647.700,00	523.061.800,00	418.651.850,00	156.004.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah		1.042.412.799,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.01.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dijalankan rajanya				13 Unit	13 Unit	247.317.700,00	257.307.700,00	224.065.850,00	-23.251.850,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			376.104.322,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.01.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	10.330.000,00	10.330.000,00	13.740.000,00	3.410.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			43.750.000,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.01.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	255.424.100,00	180.846.000,00	175.846.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			622.558.477,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan				4 Hari	4 Hari	1.566.944.397,90	1.725.887.180,02	1.285.490.306,17	2.193.807.497,90							3.760.752.494,00	
	3.26.02.01.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	563.697.501,00	243.735.600,00	76.301.000,00	-487.396.501,00			Memperkuat penyearasan keuangan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi	Destinasi Tujuan Wisata		196.056.523,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.02.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	563.697.501,00	243.735.600,00	76.301.000,00	-487.396.501,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kev/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyearasan keuangan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			196.056.523,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJARA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJARA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PELIBINGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.26.02.1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	292.145.000,00	775.465.000,00	742.136.300,00		449.991.300,00		Memperkuat penyalasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi	Pemerintah Daerah		3.054.778.880,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.02.1.02.0002		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	246.020.000,00	724.340.000,00	739.536.300,00		493.516.300,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi		1.735.921.872,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.02.1.02.0004		Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				3 Unit	3 Unit	46.125.000,00	51.125.000,00	2.600.000,00		-43.525.000,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi		1.318.857.008,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.02.1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Kegiatan, Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Ditembangkan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit 30 Kegiatan 40 Orang	2 Unit 30 Kegiatan 40 Orang	711.102.496,00	706.666.500,02	387.053.000,17		-324.049.495,83	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi	Destinasi Pariwisata Propinsi	509.917.091,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.02.1.03.0004		Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	481.691.750,00	166.999.999,99	137.000.000,15		-324.691.749,85	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi		70.560.000,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.02.1.03.0010		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Ditembangkan				30 Orang	30 Orang	98.363.900,00	387.841.500,03	136.875.000,02		38.511.100,02	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi		113.957.280,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.02.1.03.0011		Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan, Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1 Kegiatan	1 Kegiatan	151.048.846,00	151.845.000,00	113.178.000,00		-37.668.846,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi		325.399.811,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata Nusanantara Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara				3 3500000 3000 Orang Orang	3 3500000 3000 Orang Orang	1.076.000.000,00	927.348.750,00	726.025.350,00		880.733.332,00						1.356.733.332,00	
3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tama, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen 5 Kegiatan	1 Dokumen 5 Kegiatan	1.078.000.000,00	927.948.750,00	726.025.950,00		-349.974.050,00		Melanjutkan hllmsasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi	Wisatawan Nusanantara dan Mancanegara	1.956.739.392,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	
3.26.03.1.01.0001		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	354.000.000,00	223.438.750,00	231.797.950,00		-122.202.050,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hllmsasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi		374.400.000,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.26.03.1.01.0006		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	722.000.000,00	704.510.000,00	494.228.000,00		-227.772.000,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hllmsasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi		1.582.339.392,00	DINAS PARWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kepariwisataan intelektual				45 Orang	45 Orang	86.000.000,00	79.310.000,00	4.000.000,00	-82.000.000,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Hutan dan Komoditi Pertanian lainnya			168.544.081,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terstandarisasi				240 Orang	240 Orang	775.000.000,00	1.250.200.000,00	679.472.775,00	233.000.001,00							1.088.000.001,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKN				30 Orang 30 Orang 90 Orang	30 Orang 30 Orang 90 Orang	461.433.930,00	481.053.930,00	380.171.800,00	-81.262.130,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (ge nerasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Mengembangkan Daya Dukung Lingkungan	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif		58.1196.046,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan				30 Orang	30 Orang	155.735.310,00	178.640.310,00	82.942.000,00	-92.793.310,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (ge nerasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Mengembangkan Daya Dukung Lingkungan			315.813.478,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKN																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKN				90 Orang	90 Orang	305.698.620,00	302.413.620,00	317.229.800,00	11.531.180,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (ge nerasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Mengembangkan Daya Dukung Lingkungan			265.382.568,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Diberikan Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang 40 Orang 45 Orang	40 Orang 40 Orang 70 Orang	313.566.070,00	789.146.070,00	299.300.975,00	-14.265.095,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (ge nerasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Mengembangkan Daya Dukung Lingkungan	Sumber Daya Manusia Pelaku Ekonomi Kreatif		426.803.955,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	143.026.905,00	593.026.905,00	145.678.905,00	2.650.000,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNJUNGAN BIDANG PENDUKUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (ge nerasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Mengembangkan Daya Dukung Lingkungan			128.268.785,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				45 Orang	45 Orang	170.539.165,00	178.119.165,00	153.824.070,00	-16.915.095,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (ge nerasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Mengembangkan Daya Dukung Lingkungan			298.535.170,00	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
			J U M L A H						15.465.289.304,00	16.565.289.304,00	14.436.456.296,49	872.271.123,419,53							26.517.805.570,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAK KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama 5 (Lima) Tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yaitu:

Visi	Misi
“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”	1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
	2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
	3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan misi ke-2 yaitu **MEWUJUDKAN MASYARAKAT BAHAGIA DAN PRODUKTIF MELALUI PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN**. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, yaitu **MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**. Tujuan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, daya saing, serta kontribusi pada sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif terhadap pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan dua sasaran utama dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Sasaran ini merupakan indikator keberhasilan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan dua sasaran utama yang menjadi fokus dalam Renstra 2025-2029, yaitu **MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA** dan **MENINGKATNYA NILAI PDRB SEKTOR EKONOMI KREATIF**.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut:

SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,34
2	Meningkatnya Jumlah Kunjungan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	25.000

	Wisatawan Mancanegara	M mancanegara	
3	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,76

3.2 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. ROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Kegiatan : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2. PROGRAM: PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- Kegiatan : a. Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi;
- b. Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- c. Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi;

3. PROGRAM: PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

4. PROGRAM: PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Kegiatan : a. Penyedia Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
- b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

5. PRORAM: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- Kegiatan : a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Untuk menjalankan program/kegiatan tahun 2025 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 17.473.623.806,89- Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah. Dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA 2025

KODE	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana
			Target Kinerja		Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	5		6	7	
URUSAN PARIWISATA					14,429,076,296.49	17,473,623,806.89	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	68,5	68,5	Rp 11,536,618,149.32	Rp 11,955,791,937.37	
01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas	86	86	200,833,637	477,974,850	
01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	200,833,637	477,974,850	PAD
01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	95%	3	8,484,670,704.32	8,455,558,278.10	
01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji, Tunjangan TPP	63	63	8,248,365,704.32	8,167,073,278.10	DAU, DBH, Silpa
01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	12	12	136,080,000	130,080,000	PAD
01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Layanan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	1	100,225,000	158,405,000	PAD

01.1.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	2	2	69,237,000	107,507,500	PAD
01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2	2	69,237,000	107,507,500	PAD, SILPA
01.1.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	1	63	109,776,000	128,311,000	
01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Pegawai Yang Tersedia	1	1	59,800,000	59,800,000	DBH
01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data dan Informasi Yang Terpenuhi	3	3	46,600,000	65,911,000	PAD
01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang mengikuti Sosialisasi Peraturan	46	63	3,376,000	2,600,000	PAD, SILPA
01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Digitalisasi Arip Perangkat Daerah	12	12	182,982,708	232,697,370	
01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	2	8,263,500	12,481,300	DBH, PAD, SILPA
01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang	1	1	40,599,794	80,427,730	PAD
01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3	4	17,742,424	23,411,349.97	PAD

01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4	4	116,376,990	116,376,990	PAD, SILPA
01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	3	-	-	52,496,600	
01.1.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1	-	-	-	PAD
01.1.07.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	1	1	-	32,303,600	PAD
01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang	3	1	-	20,193,000	PAD
01.1.08	Kegiatan : Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	12	12	2,070,466,250	1,760,791,875	
01.1.08.000	Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	4	258,620,000	269,835,000	PAD
01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang	12	4	1,811,846,250	1,490,956,875	PAD
01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	12	12	418,651,850.00	740,454,464.30	
01.1.09.0001	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13	13	224,065,850	236,565,850	PAD
01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13	28	13,740,000	34,330,000	PAD

01.109.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya yang	1	1	180,846,000	469,558,614	PAD
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	4	4	1,205,490,300.17	1,792,365,822.52	
02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Destinasi Wisata Yang Terakses Dengan Baik	100%	100%	76,301,000.00	377,702,000.00	
02.1.01.00 06	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tari,	1	1	76,301,000.00	377,702,000.00	PAD, DBH
02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Destinasi Wisata Memiliki	100%	100%	742,136,300.00	738,491,298.50	
02.1.02.00 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan	1	2	739,536,300.00	735,891,298.50	DBH
02.1.02.00 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara	2	1	2,600,000.00	2,600,000.00	DBH, PAD
02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Dokumen Perencanaan Destinasi	100%	100%	387,053,000.17	676,172,524.02	
02.1.03.00 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang	2	1	137,000,000.15	343,332,524.00	PAD, DBH
02.1.03.00 10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis	30	30	136,875,000.02	214,103,000.02	PAD, DBH

02.1.03.00 11	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi pariwisata	1	1	113,178,000	112,677,000	PAD, DBH
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dipromosikan Ke	100%	100%	726,025,950	1,478,221,150	
03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Pengunjung Kegiatan Promosi Pariwisata Mancanegara	100%	100%	726,025,950	1,478,221,150	
03.1.01.00 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Cetak,	2	2	231,737,950	473,273,350	PAD, DBH
03.1.01.00 06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	2	2	434,228,000	398,341,800	DBH, PAD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Presentase Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	100%	100%	281,469,122	1,257,772,122	
04.1.01	Kegiatan : Penediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Presentase Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki Sarana	30	30	201,170,802	1,213,902,122	
04.1.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang	2	1	8,130,000	1,025,727,320	PAD, DBH
04.1.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan	2	1	1,830,000	1,830,000	PAD, DBH
04.1.01.00 06	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Dokumen Promosi Yang Dilakukan dalam	2	3	191,210,802	186,344,802	PAD, DBH

04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif	100%	100%	80,298,320.00	43,870,000.00	
04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	Terfasilitasinya Kebutuhan Ruang Kreatif Bagi	70	45	76,298,320.00	34,870,000.00	DBH
04.1.02.0013	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Bagi Pelaku Usaha Kuliner Yang	8	4	4,000,000.00	9,000,000.00	PAD, DBH
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Kualitas dan Kuantitas Sumbet Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	100%	679,472,775	989,472,775	
05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Presentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkapasitas	100%	100%	380,171,800.00	401,889,467.00	
05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah	Jumlah Orang Aparatur Pemerintah Daerah Yang Mendapatkan	60	30	62,942,000	21,801,000	PAD, DBH
05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada	30	90	317,229,800	380,088,467	PAD, DBH
05.1.02	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mandiri	100%	100%	299,300,975.00	587,583,308.00	
05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	100	40	145,676,305	443,576,305	DBH, DAU, PAD
05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekononomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang	25	25	153,624,070	144,006,403	PAD, DBH

BAB IV
P E N U T U P

Demikian Perencanaan kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang penuh keterbatasan dalam penyusunan, semoga perencanaan kinerja dapat memberikan arah strategi yang sangat jelas bagi pembangunan pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga dalam pelaksanaannya, Perencanaan Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan publik dan dapat dioertanggungjawabkan kepada publik serta mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan tentu saja muara akhirnya pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah.

Perencanaan Kerja (Renja) Perubahan ini jauh dari kesempurnaan dan memerlukan banyak perbaikan untuk itu masukan dan saran terhadap perbaikan sangat diharapkan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Palu, 31 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006